BAB III - ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menentukan Isu-Isu Strategis memperhatikan aspek-aspek kajian sebagai berikut :

1. Hasil analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
2. Hasil Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Hasil Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Kabupaten /Kota
4. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) bagi pelayanan DLH Provinsi Jambi
5. Telaahan terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Memasuki milenium ke tiga, masyarakat global menghadapi sebuah fenomena lingkungan berupa keterbatasan daya dukung lingkungan. Ekploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, peningkatan pesat jumlah penduduk yang dibarengi dengan penguasaan ilmu dan teknologi telah mendorong perkembangan industri secara luar biasa. Kesemuanya itu bermuara kepada perubahan iklim bumi sebagai efek dari pemanasan global atau global warming. Berbagai upaya untuk mengurangi produksi Gas Rumah Kaca telah dilakukan namun tetap saja belum sepadan dengan kondisi kerusakan yang telah terjadi.

Provinsi Jambi sebagai bagian dari masyarakat global, tentu tak lepas dari dampak global warming ini, oleh karenanya peningkatan kepedulian dan upaya pengurangan produksi gas rumah kaca menjadi isu lingkungan yang cukup serius. Pada tingkat lokal, efek global warming ini dapat dirasakan pada perubahan iklim yang kemudian berdampak kepada masalah

ketersediaan air, dimana akan terdapat over supply pada musim penghujan (banjir) dan kelangkaan air pada musim kemarau. Itu semua diperparah oleh beberapa kondisi lokal yang justru kontra produktif baik dengan upaya pengurangan efek gas rumah kaca maupun pengendalian dampaknya. Beberapa kondisi lokal tersebut diantaranya adalah :

1. Berkurangnya tutupan hutan dan lahan, terutama di area hulu sungai sebagai akibat dari ilegal logging dan alih fungsi hutan dan lahan;
2. Sedimentasi sungai dan danau;
3. Tingginya potensi Konflik penguasaan lahan;
4. Masih Rendahnya kesadaran dalam menjaga keletarian sumber daya alam yang ada;

Wilayah Provinsi Jambi meliputi dataran tinggi bukit barisan di sebelah barat hingga kawasan hutan mangrove di pantai timur sumatera. Provinsi ini dilintasi oleh sungai batanghari, yang secara langsung maupun tidak telah menjadi penentu kegiatan ekonomi masyarakat Jambi secara turun temurun. Sungai ini sekaligus menjadi indikator bagi kualitas lngkungan hidup di Provinsi jambi, terutama terkait dengan sumber daya air.

Dari sisi geologi, Provinsi Jambi terletak sangat dekat dengan negara tetangga, oleh karenanya bencana lingkungan yang terjadi di Provinsi ini dampaknya akan terasa tidak saja secara lokal, melainkan juga regional dan dapat berdampak kepada hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Bencana kabut asap adalah salah satu bencana yang dapat berdampak regional sebagai akibat dari alih fungsi lahan gambut.

Sementara itu penurunan kualtas lingkungan yang berdampak lokal pun mengakibatkan kerugian bahkan bencana yang menelan kerugian yang cukup besar, diantaranya adalah :

1. Penurunan kualitas air sungai dan air permukaan lain sebagai akibat dari :
   a. Ilegal Mining
   b. Limbah industri dan kegiatan usaha lain
   c. Limbah domestik
2. Banjir, longsor di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau
3. Berkurangnya fungsi sungai sebagai prasana transportasi karena sedimentasi sungai akibat run off di kawasan hulu dan erosi tebing di sepanjang DAS.

4. Berkurangnya keanekaragaman hayati yang berpotensi pada terganggunya keseimbangan alam dan dapat memicu bencana lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi danpermasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan dalam pelayanan di DLH Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

a. Proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan DLH Provinsi masih kurang
b. Relatif sedikitnya jumlah aparatur di DLH Provinsi Jambi yang benar-benar menguasai teknik-teknis pengendalian dampak lingkungan
c. Lemahnya kinerja staf untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pemulihan SDA dan LH
d. Lemahnya koordinasi dengan parapihak terkait, terutama instansi/SKPD yang terkait langsung terhadap pengendalian lingkungan

Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas, ini dibagi atas 2 faktor yaitu interna dan faktor ekstenal antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal
   a. Rendahnya motivasi, inovasi dankreatifitas sebagian staf
   b. Rendahnya minat baca terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup
   c. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf untukmengatasi berbagai masalah lingkungan
   d. Sarana dan prasarana kerja yagn masih kurang memadai guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi
2. Faktor Eksternal
   a. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha kan pentingnya kelestarian lingkungan hidup
   b. Kurangnya lembaga yangmembimbing, menggerakkan dan membantu masyarakat dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup

c. Kebijakan,perencanaan,program dankegiatan yang kurang memperhatikan printip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
d. Kurangnya penelitian dan pengkajian dibidang lingkungan hidup yang bisa membantu memberikan solusi permasalahan lingkungan hidup
e. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan.

Untuk lebih jelasnya identifikasi permasalahan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang dikelompokan berdasarkan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DLH Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Tingkat Pencemaran dan kerusakan lingkungan Tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tingkat penegakan hukum lingkungan	Masih tingginya tingkat pencemaran air, udara dan tanah • Tingkat ketaatan dunia usaha dalam melengkapi dokumen lingkungan hidup masih rendah • Tingkat ketaatan dalam mengimplementasikan ketentuan didalam dokumen AMDAL belum maksimal Masih rendahnya tingkap pemahaman	Jumlah pemantauan lingkungan dibagi jumalh target pemantauan lingkungan x 100 lingkungan Jumlah perusahaan yang memiliki AMDAL dibagi jumlah perusahaan wajib AMDAL x 100% Jumlah pengaduan yang masuk dibagi	a. Rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas sebagian staf b. Rendahnya minat baca terhadap peraturan perundangan tentang lingkungan hidup c. Sarana danprasarana kerja yang masih kurang memamdai guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi	a. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup b. Kurangnya lembaga yang membimbing, menggerakan dan membantu masyarakat dalam penanganan permasalahan LH c. Kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan yagn kurang memperhatikan prinsip pembangunan yang	a. Proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan DLH Provinsi Jambi masih kurang b. Relatif sedikitinya jumlahs taf DLH Provinsi Jami yang benar-benar menguasai teknik pengendalian dampak lingkungan c. Lemah kinerja staf dalam pelaksanaan fungsi pemantauan danpemulihan SDA dan LH d. Lemahnya koordinasi degnanpihak

	masyarakat terhadap peraturan peundangan bidang lingkungan hidup	jumlah target penyelesaian pengaduan x 100%		berkalanjutan dan berwawasan lingkungan d. Kurangnya penelitian dan pengkajian dibidang LH yang bisa membantu memberikan solusi permasalahan LH e. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap permasalahan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan	terkait yang berkaitan dengan pengendalian LH

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 - 2021, yaitu :

" TERTIB,UNGGUL,NYAMAN,TANGGUH,ADIL DAN SEJAHTERA"
JAMBI TUNTAS 2021

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Prioritas yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat

4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan lingkungan hidup dititik beratkan pada prioritas 5 (lima) yaitu "***Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan "*** dengan focus :

a) Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
b) Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan.
c) Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 5 (lima) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Lingkungan Hidup yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan.
2. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
3. Program Peningkatan Akses dan Informasi SDA dan LH
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DLH Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Meningkatnya permasalahan lingkungan (kerusakan dan pencemaran)
2. Meningkatnya tuntutan penggunaan SDA dan LH.
3. Terbatasnya data dan informasi SDA dan LH.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkugan

Untuk mewujudkan pembangunan yang menuntut pemanfaatan sumber daya alam seluas-luasnya, maka perlu didukung dengan pengendalian yang ketat. Pengendalian dimulai dengan merumuskan dokumen perencanaan sebagai instrumen awal dari pengendalian. Tetapi pada saat ini eksploitasi sumber daya alam bukan hanya menunjang pembangunan, namun masih ada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali oleh pelaku tanpa dilengkapi dengan perizinan. Hal ini diperlukan penegakan hukum yang tegas, agar sumber daya alam dipergunakan hanya untuk pembangunan dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

1. Faktor Penghambat
   a. Pola pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan LH yang kurang efektif dan efisien yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperdulikan kaidah, norma dan etika lingkungan sehingga cenderung merusak dan mencemari SDA dan LH serta menurunnya kelestarian ekosistem
   b. Kurang berperannya masyarakat adat dan lokal serta mulait terabaikannya kearifan lokal dalam pengelolaan an pemanfaatan SDA dan LH.
   c. Isu lingkungan belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
   d. Belum terpenuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai implementasi di daerah terkait perundang-undangan yang ada
2. Faktor Pendorong
   a. Adanya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan
   b. Adanya tuntutan permintaan grend produktivity
   c. Adanya ISO 9.000, 14.000, dan 17.000
   d. Adanya misi Kepala Daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pegnelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

e. Adanya kewenaganan daerah melalui otonomi daerah.

Untuk lebih detailnya keterkaitan antara faktor penghambat danpendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat dilihat pada tabel 21 dibawah ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dna Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

Visi : Jambi TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA" JAMBI TUNTAS 2021						
NO	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**			
			Penghambat		**Pendorong**	
1	Misi 5 : meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yagn berkeadilan dan berkelanjutan	a. peningkatan permasalahan lingkungan hidup b. terbatasnya data dan informasi tentang SDA dan LH c. meningkatnya penggunaan SDA dan LH d. kurangnya kesadaran dalam pengelolaan lingkungan	a.	Isu strategis tentang lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang pembangunan ekonomi	a.	Adanya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan
	Program : a. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan b. Perlindugnan dan konservasi SDA c. Peningkatan akses daninformasi SDA dan LH		b. c.	Data yang tersedia belum akurat tentang SDA dan LH kurang. Tidak ada kebijakan tentang batasan penggunaan SDA dan LH berupa Perda ataupun Pergub	b. c. d. e.	Adanya permintaan data yang mendukung green produktivity Adanya ISO 9.000, 14.000, dan 17.000 Adanya misi Kepala Daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Adanya kewenaganan daerah melalui otonomi daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung,pengendalian pencemaran,pengelolaan DAS,keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim ;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan,menyediakan hutan untuk kegiatan sosial,ekonomi rakyak dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered spesies ;
3. Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan.menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya ;

Arah Kebijakan KLHK tahun 2014-2019 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air,lahan,udara dan keanekaragaman hayati
2. Peningkatan penaatan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten
4. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup
6. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan dan
7. Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem bidang lingkungan hidup pembangunan nasional yaitu :

a. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
b. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah
c. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara bidang lingkungan hidup,penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,efektif,berkeadilan dan berkelanjutan.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi antara lain kemiskinan,penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politik.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi lebih diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isue-isue strategis daerah. Kemudian rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 - 2025 juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu juga harus dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Untuk itu dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi lebih diarahkan pada :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tergambar pada penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta laju inflasi yang rendah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi daerah.
2. Meningkatkan manajemen pemerintah yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi,akuntabilitas,supremasi hukum,keadilan dan partisipatif. Manajemen

pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai peranan penting bagi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Meningkatkan dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui program yang berupaya meminimalisasi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar daerah, serta upaya yang menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian ekosistem.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L
BesertaFaktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1 2 3	Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, Keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk emnopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan menjaga DAS dans umber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya	a. Keterbatasan dana/anggaran dantenaga yang profesionalisme megnakibatkan keurang teraplikasinya dan terimplementasinya hasil-hasil rekomendasi Amdal dan dokumen lingkungan serta izin pembuangan limbah yang terlah diberikan kepada para penggiat dan atau pengusaha selama ini, serta masih rendahnya aplikasi hasl pengawasan dan pengendalian serta pemantauan dan pemulihan. Hal ini terbukti dari belum sepenuhnya hasil dimaksud sebagai salah	a. Masih disharmoni peraturan,perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diberbagai tingkatan termasuk dipusat dan didaerah b. Kebijakan sektor yang parsial dan ekrjasama natar sektor masih perlu ditingkatkan c. Terjadinya penignkatan jumlah penduduk yang relatif menyebabkan tuntutan hidup cenderung mengeksploitasi SDA tanpa memperdulikan fungsi kelestarian lingkungan hidup	a. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang telah ditetapkan b. Program dan kegiatan inovatif yagn telah dihasilkan seperti Proper, Adipura, Adiwiyata, Menuju Indonesia Hijau dll c. Jejaring kerja dengan stake holder meliputi LSM, perguruan tinggi, kelompok masyarkat, dll. d. Adanya legalitas dan sistem kerja.

		satu umpan balik (feed back) bagiproses perencanaanprogram pegnendalian dampak lingkungan selanjutnya. b. Terbatasnya sarana dan prasaran untuk menunjang program dan kegiatan.		

3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Beberapa tahun terakhir, sektor pertanian dan pertambangan merupakan sektor penyumbang terbesar. Seiring dengan peningkatan kegiatan di sektor tersebut terjadi pula ekstensifikasi lahan yang berimbas pada degradasi hutan dan pemanfaatan hutan gambut. Selain itu, peningkatan kegiatan pertambangan baik pertambangan batubara yang resmi memiliki izin melalui KP maupun kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang banyak ditemui disepanjang DAS Batanghari juga membawa dampak buruk dan menambah kekeritisan DAS Batanghari. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan diatas cenderung tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga keberadaan **Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) dirasakan sangat penting.**

KLHS adalah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Peran KLHS dalam perencanaan tata ruang yaitu KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evauasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrument metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (ekoregion). Tujuan KLHS dalam Penataan Ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam substansi RTRW.
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi substansi RTRW.
4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat meyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara , tanah dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dapat dirangkum bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah sebagai produk dari rangkaian proses wilayah menjadi mutlak dan sangat strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu perlunya penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung beban pencemaran air sungai guna untuk memperbaiki kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berfikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/proses dan metodologi/muatan perencanaan.

Bila dikaitkan dengan hasil telaah KLHS terhadap RTRW sebagaimana dimaksud maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

3.4.1. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Permasalahan Pelayanan SKPD :
   a. Minimnya data pendukung untuk penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai
   b. Masih rendahnya koordinasi antar instansi yagn terkait denganpenghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai

c. Masih kurang terampilnya aparatur pelaksana untuk pengkajian dan penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan oleh sebab itu perlu adanya pelatihan khusu metode teknik penghitungan tersebut
d. Terbatasnya anggaran untuk pengkajian danpenghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai.
e. AMDAL masih belum mampu sebagai alat rekomendasi pengambilan kebijakan/keputusan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD ditinjau dari keberhasilan dan penanganannya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong
   a. tersedianya peraturan-peraturan yang berkairan dengan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai
   b. adanya rencana tata ruang wilayah nasional,Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai
   c. adanya komitmen untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya
   d. terbentuknya tim kajian perhitungan daya dukugn dan daya tampung lahan
   e. terbentuknya tim kajian perhitungan daya tampung beban pencemaran air.
2. Faktor Penghambat
   a. Jumlah penduduk dan kegiatan manusia yang selalu meningkat diberbagai sektor antara lain pertambangan pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi
   b. Kebutuhan akan sumber daya yang selalu meningkat sehingga sangat berpotensi timbulnya dampak lingkungan apabila tidak segera dikendalikan
   c. Ketersediaan sumber daya lahan dan air yang semakin berkurang

Untuk lebih detailnya keterkaitan antara faktor penghambat danpendorong serta permasalahan pelayanan SKPD dengan hasil telaah KLHS terhadap RTRW terakit dengan tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS terhadap RTRW Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Perhitungan daya dukung dan daya tampung serta daya dukung beban pencemaran air sungai	1. Minimnya data pendukung untuk penghitungan daya dukung dan daya tampung laan serta daya dukung beban pencemaran air sungai 2. Masih rendahnya koordinasi instansi yang terkait dengan penghitungan daya dukung dan daya tampung lahans erta daya dukung beban pencemaran air sungai 3. Masih kurang terampilnya terampilnya aparatur pelaksana untuk pengkajian dan penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan oleh sebab itu perlu adanya pelatihan khusu metode teknik penghitungan tersebut 4. Terbatasnya anggaran untuk pengkajian danpenghitungan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai. 5. AMDAL masih belum mampu sebagai alat rekomendasi pengambilan kebijakan/keputusan.	1. tersedianya peraturan-peraturan yang berkairan dengan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai 2. adanya rencana tata ruang wilayah nasional,Provinsi dan Kabupaten/Kota yagn harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan serta daya dukung pencemaran air sungai 3. adanya komitmen untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya 4. terbentuknya tim kajian perhitungan daya dukugn	1. Jumlah penduduk dankegiatan manusia yang selalu meningkat diberbagai sektor antara lain pertambangan pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi 2. Kebutuhan akan sumber daya yang selalu meningkat sehingga sangat berpotensi timbulnya dampak lingkungan apabila tidak segera dikendalikan 3. Ketersediaan sumber daya lahan dan air yang semakin berkurang

			dan daya tampung lahan 5. terbentuknya tim kajian perhitungan daya tampung beban pencemaran air	

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Beban lingkungan di wilayah Provinsi Jambi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan semakin berat. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan ini disebabkan beberapa isu lingkungan hidup yang strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi antara lain :

1. Penurunan kualitas air permukaan (sungai dan danau) yang disebabkan oleh :
   a. Alami (bencana)
   b. antropogenik (aktivitas usaha dan /atau kegiatan dan Limbah Domestik)
2. Penurunan kualitas udara ambien akibat aktivitas usaha yang berakibat pencemaran udara dan
3. Peningkatan emisi GRK dari berbagai sektor (lahan, industri/limbah, energi, transportasi) .
4. Penurunan penutupan lahan yang menyebabkan :
   a. berkurangnya daerah tangkapan air dihulu
   b. berkurangnya keanekaragaman hayati
5. Penurunan kualitas jasa lingkungan
6. Konflik penguasaan lahan